



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS JATNIKA EFFENDI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**
3. NHK : **953579**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/186 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 449.000.000**

1. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV TURBO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOBIL, PIAGGIO VSP PV150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA CUV-E Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 2.100.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 9.474.597.138**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 14.623.597.138

III. HUTANG

Rp. 373.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 14.250.597.138

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.